

**TESIS**

**PELAKSANAAN TUGAS BALAI PEMASYARAKATAN KOTA PADANG DARI  
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG**



**OLEH :**

**BOBBY BORISMAN, S.H**

**1920112073**

**PEMBIMBING 1 : Dr. FADILLAH SABRI,S.H., M.H.**

**PEMBIMBING 2 : Dr. SYOFIRMAN SYOFYAN, S.H., M.H.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

**PELAKSANAAN TUGAS BALAI PEMASYARAKATAN KOTA PADANG DARI  
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG  
(Bobby Borisman, 1920112073 Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas  
Andalas, 120 Halaman, Tahun 2019)**

**ABSTRAK**

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi Hak-haknya, anak harus mendapat kesempatan seluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, maupun sipiritual, termasuk dalam hal ini anak yang berhadapan dengan Hukum juga memiliki hak yang harus dilindungi oleh Negara, untuk mewujudkan perlindungan hak asasi anak Balai Pemasarakatan memiliki peranan strategis dalam melindungi hak-hak anak berhadapan dengan hukum, salah satu perlindungan hak anak adalah adanya pendampingan pada saat anak dihadapkan dalam persidangan anak di pengadilan sehingga anak terjamin hak-haknya selama persidangan berlangsung. Rumusan masalah dalam tesis ini yaitu, Bagaimana pelaksanaan pendampingan oleh Balai Pemasarakatan Kota Padang dalam Persidangan Anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, di Kaitkan dengan Kepastian Hukum? Bagaimana mengatasi kendala dalam pelaksanaan pendampingan oleh Balai Pemasarakatan Kota Padang dalam Persidangan Anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, serta teknik pengumpulan data primer yakni wawancara langsung dengan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan kelas I Padang dan ditambah data sekunder sebagai pendukung, maka dalam penelitian ini menurut penulis pelaksanaan pendampingan oleh Balai Pemasarakatan Kota Padang dalam Persidangan Anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, di Kaitkan dengan Kepastian Hukum secara umum telah terlaksana namun masih perlu perbaikan dalam hal penambahan sumber daya manusia dan tidak seluruh tahapan Persidangan yang bisa di dampingi oleh Balai Pemasarakatan, hal ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia dari aspek kuantitas dan jarak Geografis yang cukup jauh, kurangnya koordinasi antara Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum anak dan Wali/orang tua mengenai jadwal sidang. Kurangnya anggaran operasional Balai Pemasarakatan, adapun upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pendampingan oleh Balai Pemasarakatan Kota Padang dalam Persidangan Anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang adalah dengan cara penambahan sumber daya manusia dari aspek kuantitas dan setiap wilayah Kabupaten/Kota harus memiliki Balai Pemasarakatan, ditambah lagi penambahan anggaran operasional untuk menunjang kinerja Balai Pemasarakatan serta para pihak Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum anak dan Wali/orang tua harus saling berkoordinasi mengenai jadwal sidang.

**Kata Kunci: Tugas Balai Pemasarakatan, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Sistem Peradilan Anak,**

**IMPLEMENTATION OF THE DUTY OF PADANG CITY CORRECTION  
CENTER FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN  
THE CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN CLASS 1A PADANG STATE  
COURT**

(Bobby Borisman, 1920112073 Master of Law, Faculty of Law, Andalas University, 120  
pages, 2019)

**ABSTRACT**

Every child has dignity that deserves to be upheld. Their rights, children need to get the widest possible opportunity to grow and develop optimally both physically, mentally, socially and spiritually, including in this case children who are in conflict with the law also have the same rights. must be protected by the State, to realize the protection of children's rights Correctional Centers have a strategic role in protecting children's rights in dealing with the law, one of the protections of children's rights is the existence of assistance when children are confronted in trials of children in court so that children are guaranteed their rights during the trial took place. The formulation of the problem in this thesis is, How is the implementation of assistance by the Padang City Correctional Center in Child Trials at the Padang Class IA District Court, Linked to Legal Certainty? How to overcome obstacles in the implementation of assistance by the Padang City Correctional Center in Child Trials at the Padang Class IA District Court? The method used in this study is Juridical Empirical, as well as primary data collection techniques, namely direct interviews with Community Advisors at the Class I Correctional Center in Padang and added secondary data as support, so in this study according to the author the implementation of assistance by the Padang City Correctional Center in Child Trials in the Padang Class IA District Court, in relation to legal certainty in general it has been implemented but still needs improvement in terms of adding human resources and not all stages of the trial can be assisted by Correctional Centers, this is due to a lack of human resources from the aspect of quantity and considerable geographical distance, lack of coordination between Judges, Prosecutors, Children's Legal Counsel and Guardians/parents regarding trial schedules. Lack of operational budget for Correctional Centers, while efforts to overcome obstacles in the implementation of assistance by the Padang City Correctional Center in Child Trials at the Padang Class IA District Court are by adding human resources from the aspect of quantity and each Regency/City area must have a Correctional Center, plus additional operational budget to support the performance of the Correctional Center as well as the Judges, Prosecutors, Legal Counsel for children and Guardians/parents must coordinate with each other regarding trial schedules.

**Keywords: Duties of Penitentiary, Protection of Human Rights, Juvenile Justice System,**